

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I No.1, Jakarta Selatan. Kode Pos 12110 Telp. 021-7393593 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor : 304/Und-200.10.TR.06.01/X/2021 Jakarta, 21 Oktober 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Focus Group Discussion (FGD) Revisi dan Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan

Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata)

Yth. Daftar Undangan (Terlampir) di Tempat

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan dan diikuti dengan penyusunan revisi dan Dokumen KLHS RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata. Sehubungan dengan hal tersebut kami akan mengundang Bapak/Ibu dalam *FGD* yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/28 Oktober 2021 Waktu : Jadwal Terlampir (WITA) Tempat : Claro Hotel Makassar

Jl. A. P. Pettarani No.03, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota

Makassar

Agenda : Paparan hasil akhir revisi Perpres 55/2011 Tentang RTR

Kawasan Perkotaan Mamminasata beserta Dokumen KLHS

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Bahan FGD dapat di unduh https://bit.ly/PKMamminasata 281021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Marissa (+62 816-221-956).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional

Ir. Dwi Hariyawan S., MA NIP. 196501161994011001

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).





Lampiran I Surat Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional

Nomor: 304/Und-200.10.TR.06.01/X/2021

Tanggal: 21 Oktober 2021

DAFTAR UNDANGAN:

A. Kementerian/Lembaga

- 1. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Jeneberang Saddang; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 3. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

- 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros;
- 4. Kepala Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa;
- 5. Kepala Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar;
- 6. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional;
- 7. PPK Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional;
- 8. Agung Mungky Prayitna, ST, Penata Ruang Muda;
- 9. Marissa Putri Barrynanda, ST, Penata Ruang Muda;
- 10. Gilang Putra Prasetyo, S.Pd;
- 11. Tim Peninjauan Kembali Perpres No.55/ 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Maminasata.

C. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Pemerintah Kota Makassar

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
- 2. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.

E. Pemerintah Kabupaten Maros

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros.

F. Pemerintah Kabupaten Gowa

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa.

G. Pemerintah Kabupaten Takalar

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Takalar.

H. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Lampiran II Surat Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional

Nomor: 304/Und-200.10.TR.06.01/X/2021

Tanggal: 21 Oktober 2021

SUSUNAN ACARA

WAKTU (WITA)	KEGIATAN	KETERANGAN
Kamis, 28 Oktober 2021		
09.00-09.15	Registrasi Peserta	Panitia
09.15-09.30	Pembukaan Acara	Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional
09.30–10.00	Paparan: Hasil Revisi Perpres 55/2011 Tentang RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata	Tim Teknis Penyusun
10.00–10.30	Tanggapan: terhadap Hasil Revisi Perpres 55/2011 Tentang RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
10.30-11.00	Potensi, Permasalahan, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Perkotaan Mamminasata	Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
11.00 - 12.00	Diskusi	Seluruh Peserta
12.00 - 12.30	Penutup	Plt. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional